

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba pada akhir-akhir tahun ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan. Kebanyakan pelakunya adalah remaja belasan tahun, mereka pasti sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsi narkoba, tetapi mengapa mereka menggunakannya. Penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran.

Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum

undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar dan bandar. Kasus-kasus narkoba saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada perkembangan saat ini, narkoba tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa.

Program penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, dua metode yang paling efektif yaitu metode promotif dan preventif. Upaya upaya yg dilakukan seperti kampanye anti penyalahgunaan narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Masyarakat mempunyai peran penting didalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 4 menyatakan Undang Undang tentang Narkoba bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Badan Narkoba Nasional (BNNK) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007), yang bertanggung jawab langsung

kepada Presiden. BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan dan rehabilitas. Dibidang pencegahan BNN melakukan berbagai macam upaya agar masyarakat Indonesia tidak menyalahgunakan narkoba, selain itu BNN juga memberantas mulai dari pengedar, pemakai, dan bandar. Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. BNN kota Cirebon secara structural berkedudukan di daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada BNN melalui Provinsi dan memiliki tugas dan fungsi yaitu, (1) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Cirebon; (2) pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kota Cirebon; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Cirebon; (3) pelayanan administrasi BNN Kota Cirebon; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Cirebon. Oleh karena itu, kinerja dari pada pihak BNN khususnya di bagian penanggulangan sangat diharapkan guna mencegah serta memberantas narkoba di Kota Cirebon.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis melihat bahwa implementasi kebijakan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon masih belum optimal. Masih terdapat beberapa permasalahan seperti:

- a. Komunikasi yang masih belum optimal antara petugas dengan para audiens di dalam kegiatan sosialisasi dan antar bagian yang masih belum bersinergi dalam melakukan proses komunikasi dalam pelaksanaan program.
- b. Sumber Daya yang belum memadai seperti sumber daya manusia yang masih sangat kekurangan personil dalam pelaksanaan program dan juga fasilitas sarana dan prasarana yang belum mencukupi untuk menunjang berjalannya program di Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon.
- c. Masih kurangnya kesadaran baik itu masyarakat ataupun pelajar untuk ikut serta dalam mengupayakan program yang BNN buat mengenai pencegahan narkoba yang sering terjadi di lingkungan remaja maupun masyarakat luas.

Untuk itu penulis berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis proposal penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon Dalam Program Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja”.

(Studi Kasus di SMAN 2 Cirebon).

1.2. Rumusan Masalah

Penulis mengemukakan perumusan masalah (*problem statemen*) sebagai berikut “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Badan Narkotika Kota Cirebon masih belum optimal.”

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, selanjutnya penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di kota Cirebon?
2. Apa saja dampak dari Implementasi Kebijakan program penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon?
3. Apa saja hambatan dalam proses Implementasi Kebijakan Program penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di kota Cirebon?
4. Apa saja upaya-upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan hambatan Implementasi Kebijakan Program penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kota Cirebon?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan BNN Kota Cirebon dalam program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
2. Untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan BNN Kota Cirebon dalam program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Cirebon.
4. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang ditempuh dalam implementasi kebijakan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Cirebon.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan:

1. Penulisan proposal penelitian ini berguna untuk pengembangan kepentingan Ilmu Administrasi Negara.
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UGJ Cirebon tentang Implementasi Kebijakan dalam Program Penanggulangan Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja.

1.5.2. Secara Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan:

1. Informasi bagi para pengelola dalam upaya memperbaiki dan
2. Penambah pengetahuan penulis secara praktis dan teoritis mengenai Implementasi Kebijakan dalam Program Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

1.6. Kerangka Pemikiran

Implementasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. (Grindle 1980 dalam Budi Winarno 2014:149). Implementasi kebijakan menunjuk pada suatu aktivitas dimana kebijakan tersebut di jalankan dalam ranahnya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun pihak yang telah di tentukan dalam kebijakan. Dalam implementasi kebijakan biasanya ada yang disebut implementor kebijakan dan kelompok sasaran.

Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno 2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang telah dibuat itu telah direalisasikan atau tidak. Karena pada dasarnya dibuatnya suatu

kebijakan itu harus direalisasikan, sehingga dapat menentukan serta menghasilkan *output* dan *outcome* yang telah direncanakan.

Ouput adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output dari kebijakan tersebut. *Outcome* biasanya diukur setelah output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Teori yang digunakan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan BNN Kota Cirebon dalam Program Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja, penulis menggunakan teori dari George C. Edward III (1980) yang dikutip dalam Dwiyanto Indiahono 2017:3.

Dalam pandangan Edward III (1980) dikutip dalam (Dwiyanto Indiahono 2017:3), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

1. Komunikasi

Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*), tujuan dan sasaran dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

2. Sumber Daya

Yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus di dukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya *financial* nya. Keduanya harus diperhatikan di dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat serta seadanya. Sedangkan sumber daya *financial* menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan *financial* yang memadai maka kebijakan tidak akan berjalan secara efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

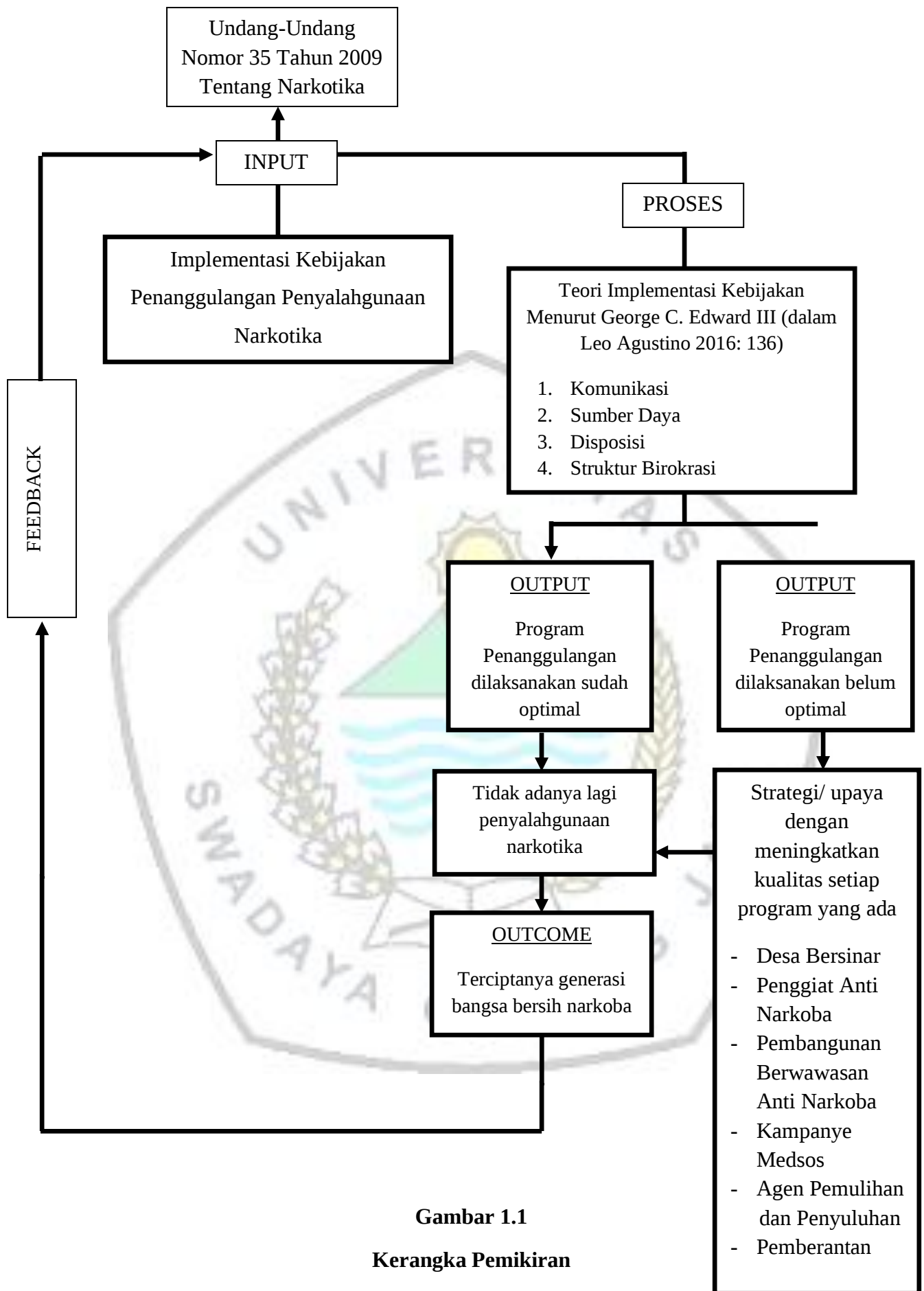
3. Disposisi

Yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor/kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Sikap ini menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementator dan program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu menunjukkan bahwa suatu birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama mekanisme dan struktur pelaksana itu sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedure (SOP)* yang dicantumkan dalam *guideline program/kebijakan*. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis dan tidak berbelit-belit, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun harus menghindari hal yang berbelit-belit dan kompleks. Karena struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang telah di sahkan oleh badan hukum atau dengan instansi terkait untuk menyelaraskan apa yang tertuang di dalamnya, untuk mengetahui apa saja hambatan yang ada dalam suatu program dan kebijakan mengenai hal terkait. Dengan ini maka penulis mengambil teori tentang implementasi kebijakan.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7. Definisi dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Definisi dan operasional konsep penelitian dalam hal ini penulis kemukakan untuk memudahkan pemahaman dan menghindari pemahaman yang berbeda atas penelitian skripsi.

Untuk itu penulis akan memperjelas pemahaman tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja kedalam kompetensi dan definisi operasional sebagai mana berikut:

- a. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan atau menerapkan apa yang sudah menjadi keputusan atau peraturan dari pemerintah. Kebijakan yang sudah ada harus diterapkan di masyarakat, apabila tidak diterapkan maka itu hanya sebuah perencanaan saja. Implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan (Udoji dalam Agustino 2006:154).
- b. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi banyaknya kasus dari mulai remaja sampai dewasa yang mengkonsumsi barang tersebut. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini bertujuan untuk melawan peredaran gelap narkoba dan menekan angka penyalahgunaan narkoba.
- c. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif untuk

tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Operasional konsep yang dimaksud dalam penelitian dan mengacu pada tujuan dan kerangka konsep penelitian maka penulis menyusun definisi parameter konsep operasional dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III ada 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi untuk memudahkan penelitian penulis menjelaskan operasional konsep dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Operasional Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan George C. Edward III (dalam Dwiyanto Indiahono 2017:31)	Komunikasi	1. Penyampaian sosialisasi/penyuluhan tentang program penanggulangan penyalahgunaan narkoba 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber daya	1. Informasi 2. Staf 3. Wewenang 4. Fasilitas
	Disposisi	1. Pengakuan birokrasi 2. Intensif
	Struktur Birokrasi	1. Koordinasi 2. Standar Operating Prosedur (SOP)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian yang digunakan

Menurut David William (dalam Moleong, 2005:5) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.

“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. David William (dalam Moleong 2005:5)”

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

“Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh penelitian dan kehadiran penelitian tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. David William (dalam Moleong 2005:5)”

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif yaitu bahwa penelitian yang dilakukan untuk mencari faktor-faktor penentu Implementasi Kebijakan, bukan untuk mencari seberapa besar pengaruh suatu variable terhadap variable lain, tetapi penelitian yang penulis lakukan untuk menggali, menemukan, dan menjelaskan tentang implementasi kebijakan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba di

kalangan remaja (Studi kasus di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon).

1.8.2. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informasi yang penulis gunakan adalah dengan Teknik Purposive Sampling dengan tujuan untuk pengambilan subjek bukan di dasarkan adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasa dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan lainnya. Sehingga tidak mengambil sample yang lebih besar. David William (dalam Moleong 2005:7). Informan dalam penelitian ini yaitu:

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini yaitu:

- Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon

b. Informan pendukung

Orang-orang diluar informan kunci dapat memberikan informasi lengkap atau tambahan yaitu:

- Kepala Bagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Siswi SMAN 2 Kota Cirebon

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2017:225), bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi (Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D2017:225).

a. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti untuk diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan dua teknik, yaitu:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan informan dan key informan.

c. Dokumentasi, dengan mengambil dokumen dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan dokumen dalam bentuk gambar/foto yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1. Data Primer: menggunakan metode wawancara kepada informan yaitu pengumpulan dengan cara melakukan wawancara kepada informan
2. Data Sekunder: dilakukan dengan cara mencari data-data yang tersedia yang diperlukan oleh penyusun sebagai referensi dan bahan acuan penelitian. Seperti bahan-bahan referensi, studi kepustakaan melalui literatur-literatur yang dibutuhkan penulis.

1.8.4. Pengujian Keabsahan Data

Teknik Triangulasi menurut Sugiyono (2017:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data sumber data yang telah ada.

“Menurut Sugiyono (2017:241) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti ini menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama”.

Adapun penulis melakukan teknik triangulasi adalah dengan teknik ini dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks atau studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Menurut Sugiyono (2012:327) Adapun cara-cara yang digunakan dalam triangulasi ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan lapangan dan hasil wawancara dengan para informan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

“Triangulasi data dilakukan bahwa data yang diperoleh adalah data yang akurat dan valid, maka dilakukan validasi data dengan teknik tringulasi yaitu dengan mengajukan pernyataan yang sama pada informan yang berbeda terhadap data maupun informan dari hasil wawancara. (Sugiyono, 2012:327)”.

Tringulasi data dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh untuk menghindari dari biasanya penelitian, informan digali dari sumber lain yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di BNN Kota Cirebon.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam teknik ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut di analisis dan di interpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:246) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif.

3. Pemeriksaan Kesimpulan

Tahap akhir pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan dari penelitian ini.

1.9 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

1.9.1. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon Jl. Sunyaragi No.2, Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132.

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena:

1. Adanya masalah
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian
3. Lokasi penelitian mudah dijangkau sehingga lebih efektif bagi penelitian dalam melakukan penelitian.

1.9.2. Jadwal Penelitian

Jadwal kegiatan ini berisi kegiatan apa saja yang dilakukan dan selama 3 bulan melakukan kegiatan penelitian. Berdasarkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

Tabel 1.2
Rencana Jadwal Penelitian

No	Tahun	2020																							
	Bulan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
	JENIS KEGIATAN																								
1.	TAHAPAN PERSIAPAN																								
	1. Studi Literatur																								
	2. Pengamatan																								
	3. Penyusunan dan Bimbingan Proposal																								
	4. Seminar Proposal																								
II.	TAHAP PELAKSANAAN																								
	1. Penelitian																								
	2. Wawancara																								
	3. Pengolahan Data																								
	4. Penyusunan dan Bimbingan Draft Skripsi																								
III.	TAHAP AKHIR																								
	1. Seminar Draft Skripsi																								
	2. Sidang Skripsi																								